

Diterima: [Juli 04, 2025]

Direvisi: [Oktober 13, 2025]

Diterbitkan: [Juli 29, 2026]

Article type: [Research Article] | Subject area: [Defense & Strategic Studies] | Running title: [Indonesian Defense Strategy in ASEAN Security]

KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA: STRATEGI PENGUATAN KEAMANAN REGIONAL ASEAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DI ASEAN

Imam Budiman¹, Bulbul Abdurachman², Naila Essenza Quraniq³,
Talitha Sani Azmi⁴, Fahira Yuki Aulia⁵

¹Hubungan Internasional, Universitas Pasundan

²Hubungan Internasional, Universitas Pasundan

³Hubungan Internasional, Universitas Pasundan

⁴Hubungan Internasional, Universitas Pasundan

⁵Hubungan Internasional, Universitas Pasundan

*Corresponding author: imam.budiman@unpas.ac.id

ABSTRACT

This research is part of the Higher Education Leading Basic Research Program (Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi/PDUPT) entitled “Indonesia’s Defense Cooperation: A Strategy for Strengthening ASEAN Regional Security in Addressing Regional Threats.” The study examines how Indonesia develops defense cooperation as a strategic response to the evolving security dynamics in the Indo-Pacific, particularly amid intensifying major power rivalry reflected in the escalation of the South China Sea dispute and the establishment of AUKUS. The research pursues three main objectives: (1) to map Indonesia’s and ASEAN’s threat perceptions using the Balance of Threat framework; (2) to analyze Indonesia’s defense cooperation patterns through bilateral, multilateral, and minilateral arrangements within the Regional Security Complex framework, particularly the Regional Security Architecture; and (3) to examine the role of Indonesian diplomacy in managing security threats across ASEAN. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing literature review, policy document analysis, and secondary data obtained from relevant institutions. Data were analyzed systematically through data reduction, categorization, and conclusion drawing based on regional security conceptual frameworks. The findings indicate that threat perceptions are dynamic and shaped by the interaction of the four variables of the Balance of Threat theory. Indonesia responds by diversifying defense partnerships across bilateral, multilateral, and minilateral levels, strengthening military capabilities through the Minimum Essential Force (MEF) modernization program, and employing diplomacy as a key instrument for managing identified regional security threats. This research has reached Technology Readiness Level (TRL) 3, with the mandatory output being publication in a nationally accredited scientific journal.

Keywords: Defense cooperation; Defense diplomacy; Indonesian defense; Traditional security threats; ASEAN.

DOI: <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v9i1.61283>

Lisensi: CC BY-SA 4.0

RESEARCH HIGHLIGHTS

[Integrates Balance of Threat and RSCT to analyze ASEAN security dynamics.]

I. PENDAHULUAN

Keamanan internasional pada hakikatnya ditopang oleh suatu tatanan normatif yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan menciptakan stabilitas kawasan. Dalam perspektif realisme struktural, sistem internasional yang bersifat anarkis, mendorong setiap negara untuk memaksimalkan

keamanannya melalui pembangunan kapabilitas militer dan pembentukan aliansi strategis (Walt, 1987).

Kawasan Asia Tenggara dalam upaya membangun tatanan keamanan regional diwujudkan melalui ASEAN yang didirikan pada tahun 1967 berkomitmen menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama (ASEAN, 1967). Komitmen tersebut diperkuat melalui *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) tahun 1976 yang menegaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan, non-interferensi, dan penyelesaian sengketa secara damai (ASEAN, 1967).

Selanjutnya, *ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025* menegaskan visi ASEAN untuk membangun komunitas yang damai, saling menghormati, dan mampu menghadapi tantangan keamanan secara kolektif (ASEAN, 2016). Dalam kerangka tersebut, forum seperti *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus dikembangkan sebagai mekanisme konsultasi dan kerja sama pertahanan guna memperkuat stabilitas kawasan melalui pelibatan negara-negara anggota beserta mitra dialognya (Pangemanan et al., 2021).

Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia diposisikan sebagai *regional stabilizer* yang diharapkan mampu mendorong terbentuknya arsitektur keamanan kawasan yang inklusif dan adaptif.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam kebijakan pertahanan nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang bersifat defensif aktif dengan menempatkan diplomasi sebagai instrumen utama dalam mengelola hubungan antarnegara (UU No. 3/2002). Doktrin pertahanan Indonesia mengedepankan keseimbangan antara pembangunan kapabilitas militer dan penguatan kerja sama pertahanan internasional guna mendukung keamanan kawasan (Herindra, 2025). Sejalan dengan itu, politik luar negeri bebas aktif mengamankan Indonesia untuk tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, tetapi tetap berkontribusi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Herindra, 2025).

Namun demikian, dinamika keamanan Asia Tenggara menunjukkan kondisi yang semakin menjauh dari tatanan normatif tersebut. Ancaman tradisional yang dipahami sebagai ancaman militer antarnegara melalui penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisasi kembali mengemuka sebagai sumber utama ketidakstabilan kawasan (Soesilowati et al., 2025). Berbeda dengan asumsi yang berkembang pasca-Perang Dingin mengenai menurunnya relevansi ancaman tradisional, perkembangan geopolitik abad ke-21 justru memperlihatkan meningkatnya sengketa teritorial, rivalitas kekuatan besar, dan perlombaan kapabilitas militer yang semakin memperumit lingkungan keamanan Asia Tenggara.

Sengketa Laut China Selatan merupakan manifestasi paling nyata dari ancaman tradisional yang dihadapi kawasan ASEAN. Melalui klaim *Nine-Dash Line*, Tiongkok mengklaim sekitar 90 persen wilayah Laut China Selatan, sehingga tumpang tindih dengan klaim Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna (Villia et al., 2026). Meskipun Putusan Arbitrase Internasional tahun 2016 menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Tiongkok tetap menolak putusan tersebut dan melanjutkan pembangunan instalasi militer di berbagai fitur maritim yang disengketakan (Villia et al., 2026). Militerisasi pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly dan Paracel tidak hanya meningkatkan potensi konflik teritorial, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan (Adhipratama, 2025).

Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring menguatnya rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Strategi *Freedom of Navigation Operations* (FONOPS) yang dijalankan Amerika Serikat berhadapan langsung dengan

kepentingan strategis Tiongkok yang memandang Laut China Selatan sebagai *sphere of influence* (Eshanasir, 2025). Di sisi lain, modernisasi militer Tiongkok telah memperkuat dilema keamanan di kawasan (Okwara, 2025). Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan belanja militer Tiongkok yang menurut *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) mencapai US\$336 miliar pada tahun 2025 atau meningkat 7,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menandai kenaikan selama 31 tahun berturut-turut (SIPRI, 2026). Akibatnya, negara-negara ASEAN dihadapkan pada tekanan untuk menentukan posisi strategis di tengah persaingan dua kekuatan besar tanpa mengorbankan prinsip netralitas yang selama ini menjadi identitas kawasan (De Castro, 2022).

Selain rivalitas kekuatan besar, ketegangan antarnegara di Asia Tenggara juga masih terus berlangsung, seperti sengketa maritim Indonesia–Malaysia di Ambalat, konflik perbatasan Thailand–Kamboja di kawasan Preah Vihear, serta dampak strategis ketegangan di Selat Taiwan terhadap jalur pelayaran yang melintasi Asia Tenggara (Anwar et al., 2025). Dinamika tersebut mendorong peningkatan belanja militer negara-negara kawasan. SIPRI mencatat bahwa belanja militer Asia Tenggara tumbuh sebesar 15 persen pada tahun 2025, menjadikannya kawasan dengan pertumbuhan tertinggi kedua di dunia setelah Eropa Timur. Indonesia mencatat peningkatan tertinggi sebesar 28 persen, diikuti Vietnam sebesar 27 persen (SIPRI, 2026). Tren ini menunjukkan bahwa persepsi ancaman di kawasan tetap tinggi dan menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pertahanan masing-masing negara.

Meskipun demikian, respons kolektif ASEAN terhadap berbagai ancaman tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan. Prinsip non-interferensi dan mekanisme konsensus yang menjadi karakter utama ASEAN sering kali menghambat lahirnya respons yang tegas terhadap ancaman keamanan antarnegara (Caballero-Anthony, 2022). Hal ini terlihat dari sikap ASEAN yang tidak secara eksplisit menyebut Tiongkok dalam berbagai pernyataan bersama mengenai sengketa Laut China Selatan akibat perbedaan kepentingan di antara negara anggotanya, termasuk tekanan diplomatik terhadap beberapa negara ASEAN (Caballero-Anthony, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme keamanan regional yang ada belum sepenuhnya mampu merespons dinamika ancaman tradisional yang semakin kompleks.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menempati posisi yang strategis sekaligus dilematis. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki kapasitas politik dan legitimasi untuk mendorong penguatan arsitektur keamanan kawasan. Namun, pada saat yang sama Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara-negara anggota ASEAN, dinamika rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, serta konsistensi terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Situasi inilah yang menjadikan kerja sama pertahanan dan diplomasi Indonesia semakin penting sebagai instrumen untuk memperkuat keamanan regional tanpa mengorbankan sentralitas ASEAN.

Sebagai respons terhadap dinamika keamanan kawasan, Indonesia telah mengembangkan jaringan kerja sama pertahanan yang luas melalui berbagai mekanisme bilateral, multilateral, dan minilateral. Pada tingkat bilateral, Indonesia menjalin kerja sama pertahanan dengan sejumlah mitra strategis, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Jepang. Seluruh kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengharuskan ratifikasi terhadap perjanjian di bidang pertahanan dan keamanan negara (UU No. 24/2000). Sementara itu, pada tingkat regional Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum, seperti *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM), ADMM-Plus, dan *ASEAN Regional Forum* (ARF), sebagai instrumen untuk memperkuat stabilitas kawasan (Okwara, 2025). Meskipun demikian, sejauh mana keseluruhan jaringan kerja sama pertahanan tersebut berkontribusi terhadap penguatan keamanan kawasan ASEAN masih belum dijelaskan secara komprehensif dalam literatur yang ada.

Kajian mengenai kerja sama pertahanan Indonesia dan keamanan kawasan ASEAN telah berkembang secara signifikan, namun masih menyisakan sejumlah kesenjangan analitis. Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, Artikel-artikel tersebut kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu diplomasi pertahanan sebagai instrumen keamanan, kebijakan dan strategi pertahanan Indonesia, kerja sama pertahanan regional ASEAN, serta ancaman dan respons negara-negara ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Pertama, penelitian mengenai diplomasi pertahanan Indonesia umumnya berfokus pada aspek normatif, seperti kebijakan, perjanjian, dan partisipasi Indonesia dalam forum keamanan regional. Kajian-kajian tersebut belum banyak menjelaskan efektivitas diplomasi pertahanan sebagai instrumen dalam mencegah konflik, membangun kepercayaan, maupun mengelola ancaman tradisional di kawasan.

Kedua, studi mengenai kebijakan pertahanan Indonesia lebih banyak menitikberatkan pada pembangunan kapabilitas pertahanan nasional dan implementasi kebijakan domestik, sehingga kontribusinya terhadap penguatan keamanan regional melalui kerja sama pertahanan masih relatif terbatas.

Ketiga, penelitian tentang kerja sama pertahanan Indonesia cenderung mengkaji hubungan bilateral secara terpisah, seperti dengan Amerika Serikat, Australia, maupun Jepang, tanpa menganalisis bagaimana keseluruhan jaringan kerja sama tersebut membentuk arsitektur keamanan ASEAN.

Keempat, sebagian besar penelitian lebih menekankan isu keamanan non-tradisional atau keamanan secara umum, sementara kajian mengenai ancaman tradisional beserta implikasinya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, ancaman tradisional memiliki karakteristik aktor, pola interaksi, dan instrumen penanganan yang berbeda, terutama di tengah meningkatnya rivalitas strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Selain itu, dari perspektif teoritis, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan *Balance of Threat Theory*, *Regional Security Complex Theory*, dan konsep diplomasi pertahanan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Akibatnya, hubungan antara persepsi ancaman, pola kerja sama pertahanan, dan peran diplomasi Indonesia dalam memperkuat keamanan kawasan belum dijelaskan secara sistematis.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan landasan penting bagi penelitian ini. Rizal Sukma (2003) menjelaskan dilema Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap prinsip-prinsip ASEAN dan kebutuhan akan respons keamanan yang lebih efektif (Sukma, 2003). Riana Nugraha (2017) menunjukkan pentingnya diplomasi pertahanan dan pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) dalam memperkuat postur pertahanan Indonesia, meskipun kajiannya masih berorientasi pada dimensi domestik (Nugraha, 2017). Sementara itu, Alice D. Ba (2009) dan Amitav Acharya (2001) memberikan fondasi konseptual mengenai regionalisme dan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara, namun belum secara khusus mengaitkannya dengan peran kerja sama pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman tradisional (Alice D. Ba, 2009).

Berangkat dari berbagai keterbatasan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan analitis melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan kerja sama pertahanan bilateral, multilateral, dan minilateral Indonesia dalam kerangka *Balance of Threat Theory* dan *Regional Security Complex Theory*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana persepsi ancaman memengaruhi strategi kerja sama pertahanan Indonesia, tetapi juga menganalisis kontribusi diplomasi Indonesia dalam memperkuat keamanan kawasan ASEAN melalui pendekatan yang menghubungkan dimensi ancaman, kerja sama pertahanan, dan arsitektur keamanan regional secara terpadu.

Urgensi penelitian ini setidaknya dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, secara empiris, eskalasi sengketa Laut China Selatan, meningkatnya rivalitas

Amerika Serikat–Tiongkok, serta percepatan modernisasi militer negara-negara kawasan menunjukkan bahwa ancaman tradisional masih menjadi tantangan utama bagi stabilitas Asia Tenggara. Kondisi tersebut menuntut respons yang tidak hanya berorientasi pada penguatan kapabilitas pertahanan nasional, tetapi juga pada pengembangan kerja sama pertahanan regional yang mampu mengelola dinamika keamanan kawasan secara lebih efektif.

Kedua, secara teoretis, perubahan lanskap keamanan kawasan menuntut pengembangan kerangka analisis yang lebih komprehensif. Dinamika seperti *grey zone operations*, *hybrid threats*, serta meningkatnya kompetisi antarkekuatan besar menunjukkan bahwa ancaman keamanan tidak lagi dapat dijelaskan melalui satu perspektif teoritis semata. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan *Balance of Threat Theory* dan *Regional Security Complex Theory* untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara persepsi ancaman, kerja sama pertahanan, dan diplomasi Indonesia dalam konteks keamanan kawasan ASEAN.

Ketiga, secara kebijakan, penelitian ini menjadi relevan mengingat Indonesia berada pada posisi strategis dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik Indo-Pasifik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar analitis yang mendukung perumusan kebijakan pertahanan dan diplomasi Indonesia dalam memperkuat keamanan kawasan melalui kerja sama pertahanan yang adaptif dan berkelanjutan.

Berangkat dari dinamika keamanan kawasan, perkembangan kerja sama pertahanan Indonesia, serta berbagai kesenjangan dalam penelitian terdahulu, studi ini berupaya mengisi kekosongan analitis melalui pendekatan yang mengintegrasikan persepsi ancaman, pola kerja sama pertahanan, dan diplomasi Indonesia dalam satu kerangka keamanan regional yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian keamanan regional dan hubungan internasional di Asia Tenggara, tetapi juga menghasilkan kontribusi empiris mengenai peran Indonesia dalam memperkuat arsitektur keamanan ASEAN melalui kerja sama pertahanan. Selain memperkaya literatur akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pertahanan dan diplomasi Indonesia di tengah dinamika keamanan kawasan yang terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ancaman yang berkembang di kawasan ASEAN?
2. Bagaimana Indonesia memperkuat keamanan kawasan Asia Tenggara melalui kerangka kerja sama pertahanan regional?
3. Bagaimana diplomasi Indonesia berperan dalam mengelola ancaman di kawasan ASEAN?

II. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian merupakan rencana sistematis yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, meliputi proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam dinamika diplomasi Indonesia dalam kerja sama pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat menjelaskan proses, makna, dan konteks yang melatarbelakangi fenomena yang dikaji.

Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif dilakukan melalui perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, analisis data secara induktif, serta penafsiran terhadap makna temuan penelitian. Pendekatan ini memiliki karakteristik utama, yaitu peneliti sebagai instrumen utama, penggunaan berbagai sumber data, penelitian

dilakukan dalam konteks alamiah, dan analisis yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana Indonesia memperkuat kontribusinya dalam kerja sama pertahanan kawasan Asia Tenggara serta memanfaatkan diplomasi pertahanan dalam mengelola ancaman tradisional di kawasan. Data diperoleh melalui penelaahan dokumen kebijakan, publikasi resmi ASEAN, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kerja sama pertahanan dan diplomasi Indonesia di Asia Tenggara.

III. KERANGKA TEORITIS

Konsep *Balance of Threats*

Konsep *Balance of Threat* (BoT) dikembangkan oleh Stephen M. Walt dalam artikelnya *Alliance Formation and the Balance of World Power* (1985) dan dielaborasi lebih lanjut dalam *The Origins of Alliances* (1987) sebagai pengembangan dari teori *Balance of Power* Kenneth Waltz (1979). Berbeda dengan teori sebelumnya yang menekankan distribusi kekuatan (*power*) sebagai dasar pembentukan aliansi, Walt berpendapat bahwa negara lebih cenderung membentuk aliansi berdasarkan persepsi terhadap ancaman (*threat*). Menurut Walt (1987), tingkat ancaman ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capabilities*, dan *aggressive intentions*. Berdasarkan persepsi ancaman tersebut, negara umumnya memilih strategi *balancing*, sementara bandwagoning relatif lebih jarang terjadi.

Teori BoT kemudian dikembangkan dan dikritisi oleh berbagai akademisi. Randall L. Schweller (1994) mengemukakan konsep *balance of interests* yang menekankan pentingnya kepentingan negara dalam pembentukan aliansi. Steven R. David (1991) memperluas teori melalui konsep *omnibalancing* dengan memasukkan ancaman domestik sebagai faktor penentu pilihan aliansi, sedangkan Andreas Bock dan Ingo Henneberg (2013) mengkritisi efektivitas mekanisme *balancing* melalui konsep *weak* dan *strong uncertainty*. Berbagai pengembangan tersebut memperkaya kerangka BoT sehingga tetap relevan untuk menganalisis dinamika ancaman dan respons kerja sama keamanan dalam konteks kontemporer.

Dalam penelitian ini, kerangka *Balance of Threat* digunakan untuk menganalisis persepsi ancaman di kawasan ASEAN berdasarkan empat variabel Walt (1987), yaitu ketimpangan *aggregate power*, kedekatan geografis (*geographic proximity*), perkembangan *offensive capabilities*, serta persepsi terhadap *aggressive intentions* aktor-aktor di kawasan. Keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa persepsi ancaman di ASEAN bersifat dinamis dan berbeda di setiap negara anggota. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia memperkuat kerja sama keamanan kawasan melalui diplomasi pertahanan sebagai respons terhadap ancaman tradisional di Asia Tenggara.

Regional Security Complex Theory

Regional Security Complex Theory (RSCT) dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver, serta disempurnakan dalam *Regions and Powers: The Structure of International Security* (2003). Teori ini menjelaskan bahwa ancaman keamanan cenderung terkonsentrasi secara geografis sehingga membentuk pola interdependensi keamanan di suatu kawasan. Berangkat dari konsep *Regional Security Complex* yang pertama kali diperkenalkan Buzan (1983), RSCT berasumsi bahwa negara-negara dalam satu kawasan memiliki keterkaitan

keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan negara di luar kawasan, sehingga dinamika keamanan regional perlu dipahami sebagai suatu sistem yang saling memengaruhi (Buzan & Wæver, 2003).

Menurut Buzan dan Wæver (2003), struktur kompleks keamanan regional dibentuk oleh empat unsur utama, yaitu *boundary* (batas kawasan), *anarchic structure* (struktur anarki yang terdiri atas negara-negara berdaulat), *polarity* (distribusi kekuatan di antara negara-negara kawasan), dan *social construction* (pola hubungan persahabatan maupun permusuhan yang terbentuk melalui interaksi historis). Berdasarkan keempat unsur tersebut, suatu kawasan dapat berada pada spektrum *conflict formation*, *security regime*, atau *security community*. RSCT juga menjelaskan bahwa kompleks keamanan dapat mengalami *internal transformation* maupun *external transformation*, serta dipengaruhi oleh keterlibatan kekuatan besar (*great powers*) yang dapat membentuk fenomena *supercomplex*.

Dalam konteks Asia Tenggara, RSCT menjelaskan bahwa ASEAN merupakan aktor utama yang mengelola interdependensi keamanan kawasan melalui berbagai norma dan mekanisme kerja sama, seperti *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Kawasan Asia Tenggara, termasuk dinamika Laut China Selatan, dipandang sebagai suatu kompleks keamanan regional yang memiliki keterkaitan dengan kawasan Asia Timur akibat keterlibatan kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Dengan demikian, stabilitas kawasan sangat dipengaruhi oleh interaksi antarnegara anggota maupun hubungan dengan aktor eksternal.

Untuk menjelaskan bagaimana interdependensi keamanan tersebut dikelola, penelitian ini juga menggunakan konsep *Regional Security Architecture* (RSA). Konsep ini berkembang untuk menjelaskan susunan kelembagaan yang menopang tata kelola keamanan kawasan melalui pengaturan formal maupun informal. Menurut Tow dan Taylor (2010), arsitektur keamanan regional merupakan struktur yang komprehensif dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan keamanan kawasan. Dalam perkembangannya, RSA dipahami terdiri atas tiga lapisan utama, yaitu bilateralisme, multilateralisme, dan minilateralisme, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam mendukung stabilitas kawasan (Tow & Taylor, 2010; Wilkins, 2023).

Berdasarkan kedua kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan *Regional Security Complex Theory* untuk menjelaskan bahwa keamanan di Asia Tenggara bersifat saling bergantung (*security interdependence*), sehingga ancaman terhadap satu negara dapat memengaruhi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Sementara itu, *Regional Security Architecture* digunakan untuk menganalisis bagaimana interdependensi tersebut dikelola melalui berbagai mekanisme kerja sama pertahanan, baik bilateral, multilateral, maupun minilateral. Kombinasi kedua konsep tersebut menjadi landasan analisis untuk memahami bagaimana Indonesia memperkuat keamanan kawasan melalui diplomasi pertahanan, pembangunan kepercayaan, peningkatan koordinasi, serta penguatan stabilitas dan ketahanan keamanan regional.

Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan (*defence diplomacy*) berkembang pesat setelah berakhirnya Perang Dingin seiring bergesernya paradigma hubungan internasional dari penangkalan (*deterrence*) menuju kerja sama keamanan yang lebih kooperatif. Dalam konteks ini, kekuatan militer tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen peperangan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi pada masa damai untuk mendukung kebijakan luar negeri, membangun kepercayaan, serta mencegah konflik melalui berbagai bentuk kerja sama pertahanan (Cottey & Forster, 2004). Cottey dan Forster (2004) mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur pertahanan pada masa damai sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan. Mereka menekankan konsep *strategic engagement*, yaitu keterlibatan

strategis melalui kerja sama pertahanan yang bertujuan meningkatkan transparansi, membangun *confidence building*, mengurangi kesalahpahaman, serta mendukung stabilitas keamanan regional.

Menurut Cottey dan Forster (2004), diplomasi pertahanan diwujudkan melalui berbagai aktivitas, seperti dialog dan konsultasi pertahanan, kunjungan pejabat sipil maupun militer, pertukaran personel, pendidikan dan pelatihan militer, seminar, latihan militer bersama, operasi pemeliharaan perdamaian, serta bantuan teknis di bidang pertahanan. Aktivitas tersebut tidak ditujukan untuk meningkatkan kemampuan tempur terhadap negara lain, melainkan untuk memperkuat komunikasi, interoperabilitas, dan hubungan kerja sama yang berkelanjutan. Selain itu, diplomasi pertahanan juga berkontribusi terhadap reformasi hubungan sipil-militer melalui penguatan kontrol sipil yang demokratis, transparansi tata kelola pertahanan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kondisi politik domestik masing-masing negara.

Konsep diplomasi pertahanan kemudian dikembangkan oleh Juan Emilio Cheyre (2013), yang memandangnya sebagai bagian dari *network diplomacy* yang memadukan unsur *hard power* dan *soft power* untuk memperkuat hubungan internasional melalui pendekatan non-koersif. Dalam konteks Asia Tenggara, See Seng Tan dan Bhubhindar Singh (2012) menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan menjadi mekanisme penting dalam membangun *cooperative security* melalui dialog, transparansi, dan interaksi antarmiliter guna mengurangi ketidakpastian keamanan. Sejalan dengan itu, Laksmana (2012) menegaskan bahwa forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM), dan ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) berfungsi sebagai *confidence-building measures* yang memperkuat komunikasi, pertukaran informasi, dan stabilitas keamanan kawasan.

Dalam penelitian ini, konsep diplomasi pertahanan Cottey dan Forster (2004) digunakan sebagai landasan utama untuk menganalisis peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengelola ancaman tradisional di ASEAN. Konsep *strategic engagement*, *confidence building*, dan pencegahan konflik diperkuat oleh pandangan Cheyre (2013) mengenai diplomasi pertahanan sebagai instrumen kebijakan luar negeri, Tan dan Singh (2012) tentang penguatan *cooperative security*, Laksmana (2012) mengenai peran forum pertahanan ASEAN, serta Pedrason (2024) yang menjelaskan implementasi diplomasi pertahanan Indonesia melalui mekanisme seperti ADMM, ADMM-Plus, ARF, ASEAN Maritime Forum (AMF), dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF). Kerangka konseptual ini digunakan untuk menganalisis bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia berkontribusi dalam membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama pertahanan, dan mendukung stabilitas keamanan kawasan ASEAN.

IV. PEMBAHASAN

Persepsi Ancaman Ditinjau dari *Balance of Threat*

Secara geografis, Asia Tenggara menempati posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik karena menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menjadi penghubung antara Asia Timur, Asia Selatan, dan Oseania. Posisi tersebut menempatkan ASEAN pada jalur utama perdagangan maritim internasional sekaligus menjadi ruang pertemuan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan (Jones and Supakul, 2025). Dalam perkembangannya, kawasan ini mengalami pergeseran nomenklatur regional, mulai dari Asia, Asia Timur, Asia-Pasifik, hingga Indo-Pasifik, yang menunjukkan bahwa tatanan kawasan terus berubah mengikuti dinamika distribusi kekuatan dan lingkungan strategis (Qiao-Franco et al., 2025).

Kompleksitas kawasan juga dipengaruhi oleh keragaman karakteristik geografis negara-negara ASEAN, yang terdiri atas negara kepulauan, maritim, dan daratan utama. Perbedaan karakteristik tersebut menghasilkan kepentingan serta orientasi strategis yang tidak selalu

seragam dalam merespons dinamika keamanan kawasan (Qiao-Franco et al., 2025). Perubahan lingkungan strategis semakin nyata seiring bergesernya sistem internasional dari tatanan unipolar menuju multipolar yang ditandai meningkatnya persaingan antarkekuatan besar, bahkan dipandang sejumlah akademisi sebagai bentuk *new Cold War* (Jones and Supakul, 2025). Berbeda dengan Perang Dingin sebelumnya, rivalitas saat ini menunjukkan keterkaitan erat antara dimensi keamanan dan ekonomi, sehingga negara-negara ASEAN dapat menjalin kerja sama pertahanan dengan satu kekuatan besar sekaligus mempertahankan hubungan ekonomi dengan kekuatan besar lainnya (Jones and Supakul, 2025).

Kompleksitas tersebut membuka ruang bagi perbedaan persepsi ancaman di antara negara-negara ASEAN. Jervis (1976) berargumen bahwa persepsi ancaman bukan cerminan otomatis dari situasi objektif, melainkan hasil dari proses kognitif *decision-maker* dalam menafsirkan niat dan kapabilitas aktor lain, sehingga dua negara yang menghadapi kondisi eksternal yang sama bisa sampai pada penilaian ancaman yang berbeda (Jervis, 1976). Jervis mencontohkan bagaimana Churchill telah memandang Hitler sebagai ancaman sejak awal pemerintahannya, sedangkan Chamberlain baru memiliki penilaian serupa setelah Maret 1939, sementara sebagian pihak lain tidak pernah menganggapnya sebagai ancaman (Jervis, 1976). Pola ini relevan untuk menjelaskan mengapa negara-negara ASEAN tidak selalu memiliki orientasi strategis yang sama dalam merespons persaingan kekuatan besar di kawasan.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk persepsi ancaman tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka *Balance of Threat* yang dikemukakan Walt (1987), yang terdiri atas empat variabel, yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capabilities*, dan *aggressive intentions*. Perbedaan penekanan pada masing-masing variabel menjelaskan mengapa respons negara-negara ASEAN terhadap dinamika keamanan kawasan tidak bersifat tunggal. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis persepsi ancaman Indonesia terhadap Tiongkok, Amerika Serikat melalui AUKUS, serta dinamika keamanan yang melibatkan beberapa negara ASEAN.

Aggregate Power

Menurut Walt (1987), *aggregate power* merupakan akumulasi sumber daya nasional yang meliputi kapasitas ekonomi, jumlah penduduk, kemampuan industri, penguasaan teknologi, serta kekuatan militer yang memungkinkan suatu negara membangun dan memproyeksikan kekuatan ke luar wilayahnya. Semakin besar akumulasi sumber daya yang dimiliki, semakin besar pula kemampuannya memengaruhi lingkungan strategis dan membentuk persepsi ancaman negara lain. Negara dengan *aggregate power* yang tinggi cenderung dipersepsikan sebagai ancaman apabila kapabilitas tersebut diwujudkan melalui perilaku yang memengaruhi keamanan negara lain (Waltz, 1979).

Dalam perspektif keamanan Indonesia, *aggregate power* tercermin dari meningkatnya kompetisi antara dua *great powers*, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat, yang secara signifikan memengaruhi dinamika keamanan Indo-Pasifik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam rivalitas tersebut, peningkatan kapabilitas kedua negara telah mengubah lingkungan strategis yang berdampak pada kepentingan nasional Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara sebagai bagian dari Laut China Selatan (Arif et al., 2024).

Peningkatan *aggregate power* Tiongkok tidak hanya terlihat dari modernisasi militernya, tetapi juga dari perubahan perilaku operasional di Laut China Selatan. Sejak 2020, aktivitas Tiongkok di sekitar Laut Natuna Utara semakin intensif melalui pengerahan *China Coast Guard* (CCG), kapal survei, dan *maritime militia* yang beroperasi di wilayah tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Menurut Arif et al. (2024), tindakan tersebut merupakan bagian dari strategi *grey zone*, yaitu penggunaan instrumen sipil dan aparat penegak hukum maritim yang didukung kapabilitas negara untuk memberikan tekanan tanpa memicu

konflik bersenjata secara terbuka. Keunggulan Tiongkok dalam penegakan hukum maritim dan kekuatan laut memungkinkan negara tersebut mempertahankan kehadiran operasional secara berkelanjutan sekaligus mendukung klaim *nine-dash line* melalui pola *incremental coercion* terhadap negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan, termasuk Indonesia (Arif et al., 2024).

Memasuki periode 2023–2024, meningkatnya asertivitas Tiongkok semakin memengaruhi persepsi ancaman Indonesia. Nurjanah dan Silaen (2024) menjelaskan bahwa kombinasi aktivitas militer Tiongkok dan rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik mendorong Indonesia mengevaluasi postur pertahanannya, memperkuat keamanan maritim, serta meningkatkan modernisasi kemampuan pertahanan guna melindungi hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Dengan demikian, *aggregate power* Tiongkok telah diterjemahkan menjadi kemampuan nyata untuk mempertahankan kehadiran strategis di wilayah yang bersinggungan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia (Nurjanah & Silaen, 2024).

Selain Tiongkok, peningkatan *aggregate power* Amerika Serikat juga membentuk lingkungan strategis Indonesia. Respons utama terhadap kebangkitan Tiongkok diwujudkan melalui pembentukan AUKUS pada September 2021. Menurut Wene (2021), kemitraan keamanan trilateral tersebut merupakan bentuk *balancing* terhadap meningkatnya ambisi strategis Tiongkok di Indo-Pasifik, khususnya di Laut China Selatan. Perkembangan AUKUS semakin diperkuat melalui *Optimal Pathway* pada 2023 yang mencakup rotasi kapal selam nuklir Amerika Serikat dan Inggris di Australia serta pengembangan kemampuan di bidang kecerdasan buatan, komputasi kuantum, keamanan siber, teknologi hipersonik, dan kemampuan bawah laut. Umar dan Santoso (2023) menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya mempertahankan superioritas militernya, tetapi juga memperkuat kemampuan kolektif sekutunya dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok di Indo-Pasifik.

Apabila dianalisis, Tiongkok dan Amerika Serikat sama-sama memiliki akumulasi kekuatan nasional yang sangat besar. Namun, persepsi ancaman Indonesia terhadap keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Tiongkok dipersepsikan sebagai ancaman yang lebih langsung karena peningkatan kapabilitasnya diwujudkan melalui aktivitas operasional yang bersinggungan dengan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Sebaliknya, Amerika Serikat tidak dipersepsikan sebagai ancaman langsung, tetapi peningkatan *aggregate power*-nya melalui AUKUS memperkuat kompetisi strategis di Indo-Pasifik sehingga menciptakan lingkungan keamanan yang semakin kompleks bagi Indonesia. Dengan demikian, tantangan keamanan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya kekuatan kedua *great powers*, tetapi juga oleh bagaimana kekuatan tersebut diproyeksikan dan memengaruhi lingkungan strategis kawasan.

Geographic Proximity

Menurut Walt (1987), *geographic proximity* menjelaskan bahwa negara yang berada lebih dekat secara geografis memiliki kemampuan lebih besar untuk memproyeksikan kekuatan militer, memobilisasi pasukan, serta memengaruhi keamanan negara lain dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, negara dengan kapabilitas besar yang berada di lokasi berdekatan cenderung dipersepsikan memiliki tingkat ancaman yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan kapabilitas serupa tetapi berada lebih jauh (Waltz, 1979).

Dalam perspektif Indonesia, indikator *geographic proximity* tercermin pada posisi Laut Natuna Utara. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena menjadi jalur pelayaran internasional, kaya akan sumber daya perikanan dan energi, serta berada di persimpangan kepentingan berbagai negara di Indo-Pasifik. Yusgiantoro et al. (2023) menjelaskan bahwa posisi Natuna menjadikannya salah satu wilayah perbatasan paling rentan di Indonesia karena berbatasan langsung dengan kawasan sengketa Laut China Selatan. Potensi sumber daya alam, khususnya

minyak dan gas bumi, semakin meningkatkan arti strategis kawasan tersebut, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan nasional.

Kedekatan geografis tersebut menyebabkan Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari dinamika keamanan di Laut China Selatan meskipun bukan merupakan negara pengklaim utama. Fathun (2022) menjelaskan bahwa klaim sepihak Tiongkok di Laut Natuna Utara mendorong Indonesia menyesuaikan kebijakan luar negerinya melalui diplomasi sebagai *middle power* sekaligus memperkuat perhatian terhadap keamanan wilayah perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkembangan di Laut China Selatan secara langsung memengaruhi kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam menjaga hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Fathun, 2022).

Faktor kedekatan geografis juga menjelaskan mengapa aktivitas Tiongkok di Laut China Selatan lebih memengaruhi persepsi ancaman Indonesia dibandingkan negara-negara besar lainnya. Yanga dan Zou (2024) berpendapat bahwa Pulau Natuna merupakan titik temu antara agenda pembangunan nasional Indonesia dan dinamika keamanan Laut China Selatan. Posisinya sebagai wilayah terdepan di bagian utara Indonesia menjadikan Natuna berada pada garis depan dalam menghadapi implikasi meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan (Yanga & Zou, 2024). Sebaliknya, meskipun Amerika Serikat memiliki kapabilitas militer yang sangat besar, letak geografisnya yang jauh membuat proyeksi kekuatannya lebih banyak dilakukan melalui jaringan aliansi dan kerja sama pertahanan, termasuk AUKUS dan kemitraan dengan negara-negara sekutunya di Indo-Pasifik.

Apabila dianalisis, Amerika Serikat tidak dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap Indonesia karena proyeksi kekuatannya tidak didasarkan pada kedekatan geografis, melainkan melalui kehadiran militer di negara-negara mitra kawasan. Sebaliknya, beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia memang memiliki kedekatan geografis dengan wilayah maritim Indonesia, tetapi karakter ancaman yang ditimbulkan berbeda dengan Tiongkok. Darwis dan Putra (2022) menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi kasus *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF) di Laut Natuna Utara yang melibatkan kapal berbendera Vietnam, Indonesia tetap mengedepankan diplomasi maritim dan kerja sama bilateral dalam penyelesaiannya (Darwis & Putra, 2022).

Offensive Capabilities

Variabel ketiga dalam kerangka *Balance of Threat* adalah *offensive capabilities*, yaitu kemampuan suatu negara untuk mengancam kedaulatan atau keutuhan teritorial negara lain dengan biaya yang dapat diterima. Menurut Walt (1987), *offensive capabilities* berkaitan erat dengan *aggregate power*, tetapi tidak identik, karena tidak seluruh akumulasi sumber daya nasional dapat secara langsung dikonversi menjadi kapabilitas ofensif yang efektif. Negara dengan kapabilitas ofensif yang besar cenderung memicu pembentukan aliansi, sedangkan negara yang menghadapi keunggulan ofensif yang sangat besar dapat memilih melakukan *bandwagoning* apabila peluang untuk melakukan perlawanan dinilai kecil (Waltz, 1979).

Dalam konteks Asia Tenggara, peningkatan *offensive capabilities* Tiongkok paling nyata terlihat melalui pembangunan dan militarisasi pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly dan Paracel sejak 2007 yang mengalami akselerasi pasca-2012 (Chubb, 2020). Tiongkok membangun tujuh pulau buatan, termasuk Fiery Cross Reef, Subi Reef, dan Mischief Reef, yang dilengkapi landasan pacu, sistem rudal antikapal, hanggar pesawat tempur, serta radar berkapasitas tinggi sehingga memperluas kemampuan proyeksi kekuatan di Laut China Selatan (Chubb, 2020; Sigit et al., 2025). Infrastruktur tersebut mengubah wilayah maritim menjadi pangkalan militer yang mendukung strategi *Anti-Access/Area-Denial* (A2/AD), memungkinkan Tiongkok mempertahankan kehadiran operasional secara berkelanjutan sekaligus memperkuat klaim teritorialnya (Chubb, 2020; Sigit et al., 2025).

Kapabilitas ofensif tersebut juga tercermin dalam penggunaan *China Coast Guard* (CCG) untuk menghalangi aktivitas kapal Vietnam, Filipina, Indonesia, maupun Amerika Serikat di kawasan sengketa (Chubb, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa *offensive capabilities* Tiongkok tidak hanya diwujudkan melalui modernisasi militer, tetapi juga melalui kemampuan mempertahankan tekanan operasional secara berkelanjutan terhadap negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan.

Kemudian, pembentukan AUKUS pada September 2021 menambah dimensi baru terhadap dinamika keamanan kawasan melalui rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Kapal selam tersebut memiliki kemampuan operasi jarak jauh, *stealth*, dan dapat dipersenjatai rudal jelajah berpresisi tinggi, sehingga secara substantif meningkatkan kapabilitas ofensif Australia. Melalui *Pillar I*, Australia akan memperoleh kapal selam bertenaga nuklir, sedangkan *Pillar II* memperluas kerja sama pada bidang kecerdasan buatan, komputasi kuantum, keamanan siber, teknologi hipersonik, dan kemampuan bawah laut (Idris et al., 2022; Nurfauzi et al., 2022). Dari perspektif Indonesia, perkembangan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi memicu perlombaan senjata dan mendorong Tiongkok mengembangkan teknologi militer yang lebih canggih sebagai respons terhadap perubahan keseimbangan kekuatan kawasan (Waltz, 1979).

Apabila dibandingkan, *offensive capabilities* Tiongkok dan AUKUS memiliki karakteristik yang berbeda. Kapabilitas ofensif Tiongkok telah diwujudkan melalui pembangunan pangkalan militer, strategi A2/AD, dan berbagai tindakan koersif di Laut China Selatan. Sebaliknya, kapabilitas ofensif AUKUS masih berada pada tahap pengembangan, tetapi telah dipersepsikan sebagai faktor yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan dan meningkatkan risiko perlombaan senjata di Indo-Pasifik. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa sebagian besar negara ASEAN lebih vokal menyuarakan kekhawatiran terhadap aktivitas Tiongkok di Laut China Selatan, sementara respons terhadap AUKUS cenderung lebih berhati-hati dan tidak bersifat konfrontatif.

Aggressive Intentions

Variabel keempat dalam kerangka *Balance of Threat* adalah *aggressive intentions*, yaitu persepsi terhadap orientasi kebijakan suatu aktor, apakah bersifat ekspansionis atau *status quo*. Berbeda dengan tiga variabel sebelumnya yang dapat diukur melalui indikator material, *aggressive intentions* dibentuk oleh bagaimana aktor lain menafsirkan sinyal perilaku, retorika, dan kebijakan yang ditunjukkan suatu negara (Waltz, 1979).

Dalam konteks Indo-Pasifik, persepsi terhadap niat Tiongkok mengalami pergeseran signifikan, terutama sejak kepemimpinan Xi Jinping. Dalam pidatonya pada Januari 2019, Xi secara eksplisit menyatakan bahwa reunifikasi Taiwan merupakan bagian dari *China Dream* dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapainya (Chang and Yang, 2020). Pernyataan tersebut, yang diperkuat dengan penetapan Laut China Selatan sebagai *core interest* sejak 2010, memberikan sinyal kuat mengenai orientasi strategis Tiongkok (Sigit et al., 2025). Persepsi tersebut semakin menguat setelah Tiongkok menolak putusan Mahkamah Arbitrase Permanen tahun 2016 yang menyatakan klaim *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS. Alih-alih mematuhi putusan tersebut, Tiongkok melanjutkan pembangunan pulau buatan, meningkatkan aktivitas militer, serta melakukan intimidasi terhadap kapal asing di kawasan sengketa (Cherhat, 2022). Selain itu, penggunaan instrumen ekonomi, seperti embargo impor pisang terhadap Filipina, semakin memperkuat persepsi bahwa Tiongkok bersedia menggunakan berbagai instrumen kekuasaan untuk mempertahankan kepentingannya secara koersif (Chang and Yang, 2020).

Sebaliknya, persepsi terhadap Amerika Serikat dan sekutunya melalui AUKUS memiliki karakteristik yang berbeda. Pembentukan AUKUS pada September 2021 dipandang sebagai bentuk penguatan komitmen strategis Amerika Serikat dalam menghadapi kebangkitan

Tiongkok di Indo-Pasifik, bahkan disebut sebagai salah satu pergeseran geopolitik paling signifikan sejak normalisasi hubungan Amerika Serikat–Tiongkok pada 1972 (Li, 2022). Melalui pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia serta pengembangan teknologi pertahanan mutakhir di bidang kecerdasan buatan, komputasi kuantum, keamanan siber, dan teknologi hipersonik, AUKUS dipersepsikan sebagai instrumen *deterrence* terhadap Tiongkok (Li, 2022). Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan kekhawatiran di Asia Tenggara. Indonesia menyatakan keprihatinan atas meningkatnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan, sementara Malaysia menilai AUKUS berpotensi menjadi katalis perlombaan senjata di Indo-Pasifik (Li, 2022).

Apabila dibandingkan, persepsi terhadap *aggressive intentions* Tiongkok dan AUKUS memiliki karakteristik yang berbeda. Tiongkok dipersepsikan sebagai aktor dengan kecenderungan ekspansionis yang tercermin melalui perilaku operasional di Laut China Selatan serta penggunaan berbagai instrumen koersif untuk mempertahankan kepentingannya. Sebaliknya, AUKUS tidak dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap negara-negara ASEAN, melainkan sebagai katalis yang berpotensi meningkatkan kompetisi strategis dan memperburuk dinamika keamanan kawasan. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa sebagian besar negara ASEAN tidak secara terbuka menentang AUKUS, tetapi juga tidak memberikan dukungan secara eksplisit (Li, 2022).

Pemetaan persepsi ancaman melalui kerangka *Balance of Threat* menunjukkan bahwa rivalitas kekuatan besar membentuk persepsi ancaman yang berbeda di antara negara-negara ASEAN sehingga menghasilkan fragmentasi dalam respons kawasan. Vietnam dan Filipina sebagai negara pengklaim di Laut China Selatan cenderung mendorong pendekatan yang lebih asertif, sedangkan Kamboja dan Laos yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok cenderung menghindari konfrontasi. Perbedaan tersebut tercermin dalam lambatnya negosiasi *Code of Conduct* Laut China Selatan yang hingga kini masih menunjukkan adanya *disunity* di antara negara-negara ASEAN (Pham, 2024).

Di tengah fragmentasi tersebut, Indonesia menghadapi dilema strategis sebagai negara terbesar di ASEAN yang memiliki kapasitas untuk memimpin, tetapi dibatasi oleh keterbatasan kapabilitas militer dan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Oleh karena itu, respons Indonesia lebih menitikberatkan pada diplomasi pertahanan dan kerja sama keamanan kolektif dibandingkan konfrontasi terbuka atau pembentukan pakta militer formal (Kusumadewi & Wiswayana; Silalahi et al., 2023). Pendekatan ini mencerminkan strategi *hedging*, yaitu menjaga hubungan dengan seluruh aktor, memperkuat kapabilitas nasional, serta memanfaatkan forum multilateral untuk membangun norma dan kepercayaan tanpa terjebak dalam polarisasi kekuatan besar.

Kerangka Kerja Sama Pertahanan Indonesia dalam Penguatan Keamanan Kawasan Asia Tenggara

Keamanan Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat dengan dinamika keamanan negara-negara tetangganya dalam satu *Regional Security Complex* Asia Tenggara. Keterkaitan ini terlihat dari pola *amity-enmity* di antara sesama anggota ASEAN maupun keterlibatan kekuatan besar yang memproyeksikan pengaruhnya ke kawasan. Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan menjadi instrumen utama Indonesia untuk merespons saling ketergantungan keamanan tersebut. Berdasarkan perspektif *Regional Security Architecture*, analisis terhadap kerja sama pertahanan Indonesia memerlukan pemetaan terhadap aktor, mekanisme, dan bentuk kerja sama dalam tiga lapisan utama: bilateralisme, multilateralisme, dan minilateralisme.

Pada tingkat bilateral, Indonesia menjalin kerja sama pertahanan dengan sejumlah negara strategis. Hubungan dengan Australia berlandaskan pada *Agreement on the Framework for Security Cooperation* (Lombok Treaty) tahun 2006 yang mencakup dialog strategis,

pendidikan dan pelatihan militer, kerja sama keamanan maritim, pertukaran informasi, serta penanggulangan terorisme (Fitriyan, 2025). Kerja sama ini mencapai tahap lebih komprehensif melalui penandatanganan *Indonesia-Australia Defence Cooperation Agreement* (DCA) pada tahun 2024, yang melibatkan koordinasi lintas lembaga termasuk Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan dalam harmonisasi hukum, pembiayaan, dan pelaksanaan program (Haura et al., 2025).

Hubungan pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki dinamika lebih kompleks. Setelah embargo militer AS pada 1999 akibat krisis Timor Timur, normalisasi bertahap terjadi pada 2005-2006 didorong oleh transisi demokrasi Indonesia dan ancaman terorisme global (Harsono Putra, 2025). Hubungan berkembang dari *US-Indonesia Comprehensive Partnership* (2010), *Joint Statement* (2015), hingga *Defence Cooperation Arrangement* (DCA) pada 2023 yang mencakup dialog strategis, pendidikan dan pelatihan militer, serta pembangunan kapasitas (Figo and Ervin, 2022). Hubungan ini juga memiliki mekanisme kelembagaan khas melalui *Defense Security Cooperation Agency* (DSCA) yang mengelola program pengadaan dan pelatihan militer (Harsono Putra, 2025).

Hubungan pertahanan Indonesia dengan Jepang berkembang dari kemitraan ekonomi melalui *Official Development Assistance* (ODA) sejak pasca Perang Dunia II ke bidang pertahanan pada dekade 2010-an, ditandai dengan pertemuan *two-plus-two* (2015) dan pembentukan *Indonesia-Japan Maritime Forum* (2016) (Nurjannah et al., 2025; Saputra, 2023). Aktivitas maritim kedua negara berlangsung konsisten sepanjang 2013-2022, dengan Jepang mengerahkan kapal perang *Maritime Self-Defense Force* (JMSDF) untuk kunjungan pelabuhan ke Indonesia serta latihan bersama dalam kerangka *Komodo Exercise* (2014, 2016, 2018) dan latihan bilateral di Natuna Utara dan Laut Jawa (2020-2021) (Saputra, 2023).

Selain kerja sama bilateral, Indonesia juga mengembangkan kerja sama multilateral melalui *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) yang dibentuk pada 2006 dan ADMM-Plus pada 2010 yang melibatkan delapan negara mitra dialog (Teo, 2023). Di tengah rivalitas kekuatan besar, Indonesia berperan sebagai mediator diplomatik, penguat kerja sama regional, serta pembela kedaulatan ASEAN dengan mempromosikan prinsip non-intervensi dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan (Koloay et al., 2024). Peran ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kerja sama praktis ADMM-Plus di bidang keamanan maritim, termasuk patroli keamanan laut terkoordinasi dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina serta peningkatan kehadiran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I-III (Koloay et al., 2024).

Indonesia juga berperan aktif dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) sebagai pendiri dan penggerak utama mekanisme keamanan kooperatif di Asia-Pasifik (Sembiring et al., 2024). Indonesia secara konsisten mendorong penguatan *confidence-building measures* (CBMs) melalui dialog tingkat tinggi, pertukaran informasi pertahanan, peningkatan transparansi aktivitas militer, serta latihan bersama di bidang keamanan maritim dan penanggulangan bencana (Emilia Br Sembiring et al., 2024). Komitmen ini terlihat ketika Indonesia menjadi tuan rumah *Intersessional Meeting on Maritime Security* (ISM on MS) pada 2023 yang mempertemukan 27 negara anggota ARF (Sembiring et al., 2024). Indonesia juga berperan dalam penerbitan *ARF Annual Security Outlook* serta sebagai penggagas utama *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang diadopsi pada 2019 (Emilia Br Sembiring et al., 2024; OYu et al., 2024).

Pada lapisan minilateral, kerja sama keamanan maritim Indonesia tercermin dari pembentukan *Malacca Strait Coordinated Patrol* (MALSINDO) bersama Malaysia dan Singapura pada Juni 2004 sebagai respons atas meningkatnya insiden perompakan di Selat Malaka (Arifin and Damanik, 2020). Kerja sama ini berkembang melalui penambahan *Eyes in the Sky* (EiS) pada September 2005 yang melibatkan Thailand, serta *Malacca Strait Patrol Intelligence Exchange Group* (MSP-IEG) yang diformalkan pada April 2006. Keempat negara

membentuk *Joint Coordinating Committee*(JCC) sebagai badan pengambilan keputusan yang mengoordinasikan pertukaran intelijen dan langkah operasional keamanan (Arifin and Damanik, 2020). Karakter eksklusif kerja sama ini tercermin dari penolakan Indonesia terhadap proposal *Regional Maritime Security Initiative* (RMSI) dari AS maupun *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy* dari Jepang, dengan alasan keamanan Selat Malaka merupakan tanggung jawab eksklusif negara-negara pesisir sesuai UNCLOS 1982 (Arifin and Damanik, 2020).

Pemetaan di atas menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia berkembang melalui tiga jalur dengan karakteristik berbeda. Kerja sama bilateral cenderung lebih dalam dan mengikat melalui perjanjian formal, kerja sama multilateral lebih inklusif namun tidak mengikat dengan prinsip konsensus, sementara kerja sama minilateral bersifat eksklusif dan terbatas pada negara-negara yang berbagi kepentingan langsung atas suatu wilayah atau ancaman tertentu. Kombinasi ketiga lapisan ini mencerminkan strategi diversifikasi mitra di tengah rivalitas kekuatan besar, di mana setiap lapisan dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan sensitivitas isu yang dihadapi.

Meski demikian, kerja sama pertahanan dalam berbagai formatnya pada dasarnya bersandar pada asumsi bahwa mitra akan hadir dan responsif ketika dibutuhkan, asumsi yang tidak selalu dapat dipastikan dalam sistem internasional yang anarkis. Dalam perspektif neorealisme defensif, negara tetap perlu mengandalkan kapabilitas internalnya sebagai fondasi yang tidak bergantung pada kalkulasi pihak lain (Parent and Rosato, 2015). Dalam konteks tersebut, Indonesia terus memperkuat kapabilitas militernya melalui program *Minimum Essential Force* (MEF), yaitu standar kekuatan pokok minimum TNI untuk merespons ancaman aktual terhadap kedaulatan negara (Nur Anissa and Djuyandi, 2021). MEF dilaksanakan dalam tiga tahap Rencana Strategis (Renstra): 2010–2014, 2015–2019, dan 2020–2024 (Afrihan et al., 2024). Hingga akhir Renstra II (2019), capaian terhadap standar MEF tercatat sebesar 63,19 persen dari target keseluruhan (Nur Anissa and Djuyandi, 2021). Pencapaian MEF berkontribusi pada tiga aspek utama: *deterrent effect*, *bargaining power*, dan pengurangan ancaman keamanan maritim (Widyaksa et al., 2024).

Sejalan dengan upaya mencapai MEF, Indonesia melakukan modernisasi alutsista melalui pengadaan kapal selam dari Korea Selatan (*Chang Bogo-class*), jet tempur Rafale dari Prancis, serta sistem rudal dan pesawat nirawak dari AS melalui program *Foreign Military Sales* (FMS) dan *Excess Defense Articles* (EDA) (Ariani, 2024). Indonesia juga mengembangkan kapal selam dan kapal perang melalui transfer teknologi dengan Korea Selatan serta *joint production* pesawat tempur KFX/IFX (Kennedy, 2023). Di sisi industri pertahanan dalam negeri, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia menjadi pilar utama kemandirian alutsista, didukung oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan serta pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (Kennedy, 2023; Novyanto and Faisol, 2022). PT Pindad saat ini mengklaim sebagai produsen senjata terbesar di ASEAN dengan nilai ekspor meningkat dari 41 juta dolar AS (2020) menjadi 142 juta dolar AS (2023) (Arsy et al., 2025).

Indikator keberhasilan kebijakan pertahanan Indonesia dapat dibaca dari dua hal yang saling menopang: keberlanjutan dan perluasan kerja sama pertahanan, serta pertumbuhan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri. Namun demikian, tantangan tetap ada. Anggaran pertahanan Indonesia secara konsisten berada di kisaran 0,6 hingga 0,8 persen dari PDB, jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam (Fanani et al., 2024). Porsi terbesar anggaran terserap untuk belanja operasional, sementara alokasi untuk modernisasi alutsista dan riset pertahanan masih terbatas (Surahman et al., 2024). Pada level kelembagaan, fragmentasi antar-lembaga dan proses pengadaan yang berlapis menciptakan jarak antara perencanaan dan eksekusi (Fanani et al., 2024). Kemandirian industri pertahanan yang dicita-citakan pun belum

sepenuhnya terwujud karena membutuhkan ekosistem kolaborasi yang melibatkan pemerintah, industri, universitas, lembaga riset, institusi keuangan, dan legislatif secara sinergis (Surahman et al., 2024).

Dalam geopolitik, persaingan AS-Tiongkok di Indo-Pasifik memaksa Indonesia untuk tidak terlalu condong ke salah satu pihak. Kekuatan militer Tiongkok diprediksi melampaui AS sekitar 2040, yang dapat mempersempit ruang gerak politik luar negeri bebas aktif Indonesia (Gibran et al., 2024). Posisi ini membuka peluang bagi Indonesia sebagai mediator dan jembatan diplomatik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapabilitas pertahanan yang menopangnya. Tanpa kapabilitas yang memadai, posisi netral justru rentan dipersepsi sebagai kelemahan strategis (Gibran et al., 2024). Ke depan, arah kerja sama pertahanan Indonesia akan ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan tiga hal: memperkuat kemandirian industri pertahanan, memperdalam hubungan dengan mitra strategis, dan tetap aktif dalam kerja sama keamanan multilateral. Dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045, stabilitas keamanan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang diperhitungkan (Fanani et al., 2024; Sarjito, 2023).

Diplomasi Indonesia dalam Mengelola Ancaman Di ASEAN

Meningkatnya dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik menghadirkan berbagai tantangan bagi ASEAN, terutama yang bersumber dari rivalitas kekuatan besar. Dalam penelitian ini, ancaman tersebut direpresentasikan melalui sengketa Laut China Selatan (LCS) pembentukan pakta keamanan AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), yang sama-sama berimplikasi terhadap stabilitas keamanan kawasan. Berdasarkan *Regional Security Complex Theory*, ancaman keamanan pada suatu kawasan bersifat saling berkaitan (*security interdependence*), sehingga perkembangan situasi keamanan yang melibatkan satu atau beberapa negara akan memengaruhi negara lain dalam kompleks keamanan regional yang sama (Buzan & Wæver, 2003). Berangkat dari kondisi tersebut, diplomasi Indonesia menjadi instrumen penting dalam mengelola berbagai ancaman keamanan melalui pemanfaatan mekanisme ASEAN, penguatan norma dan hukum internasional, serta penerapan politik luar negeri bebas aktif.

Keamanan suatu negara di kawasan tidak dapat dipahami secara terpisah dari negara-negara lain karena adanya hubungan saling ketergantungan (*security interdependence*). Sengketa Laut China Selatan merupakan ancaman tradisional paling sentral yang dikelola diplomasi pertahanan Indonesia, melibatkan klaim tumpang tindih Tiongkok melalui konsep “*nine-dash line*” terhadap sebagian besar wilayah laut yang juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, dengan pola eskalasi-deeskalasi yang bergantung pada intensitas penegakan klaim oleh kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok (Saputra et al., 2024).

Indonesia secara formal bukan *claimant state*, namun Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Natuna Utara tumpang tindih dengan klaim sepihak tersebut (Adikara & Munandar, 2021). Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok menambah lapisan tekanan struktural terhadap stabilitas ASEAN, menempatkan Indonesia pada dilema klasik kekuatan menengah; kebutuhan menjaga otonomi strategis dan sentralitas ASEAN berhadapan dengan tekanan untuk memihak salah satu kekuatan besar dalam isu keamanan maritim maupun rantai pasok pertahanan (Caballero-Anthony, 2020). Di samping itu, sejumlah sengketa teritorial bilateral antarnegara ASEAN seperti sengketa perbatasan darat dan laut antara Thailand - Kamboja, Malaysia - Filipina atas Sabah, serta tumpang tindih klaim landas kontinen di Laut China Selatan antarsesama negara ASEAN menunjukkan bahwa ancaman tradisional di kawasan tidak tunggal, melainkan berlapis.

Selain sengketa Laut China Selatan, dinamika keamanan kawasan juga dipengaruhi oleh pembentukan pakta keamanan AUKUS pada 15 September 2021 yang melibatkan Australia, Inggris (United Kingdom), dan Amerika Serikat (United States). Kemitraan keamanan trilateral

ini dibentuk untuk memperkuat kapabilitas pertahanan Australia melalui pengembangan kapal selam bertenaga nuklir serta kerja sama di bidang teknologi pertahanan canggih, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), keamanan siber, komputasi kuantum, dan kemampuan bawah laut (Manan et al., 2024).

Meskipun secara resmi AUKUS bertujuan memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik, banyak kajian menilai bahwa pembentukannya tidak terlepas dari upaya Amerika Serikat dan sekutunya dalam merespons meningkatnya kapabilitas militer dan pengaruh strategis Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Kondisi tersebut memperkuat rivalitas antara kedua kekuatan besar yang berdampak langsung terhadap lingkungan keamanan Asia Tenggara. Kehadiran AUKUS bagi ASEAN memunculkan kekhawatiran terhadap meningkatnya perlombaan senjata (*arm race*), potensi eskalasi konflik akibat persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, serta tantangan terhadap sentralitas ASEAN dalam menjaga arsitektur keamanan kawasan.

Seluruh ancaman tersebut bukan peristiwa bilateral yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari pola interdependensi keamanan (*amity-enmity pattern*) yang membentuk satu kompleks keamanan Asia Tenggara, di mana proses sekuritisasi suatu negara tidak dapat dianalisis secara terpisah dari negara tetangganya (Buzan & Wæver, 2003).

Karakter ancaman yang bersifat lintas batas dan saling berkaitan menuntut adanya instrumen yang mampu membangun kepercayaan, mengurangi potensi eskalasi konflik, serta memperkuat koordinasi antarnegara di kawasan.

Dalam merespons sengketa Laut China Selatan, Indonesia mengedepankan diplomasi multilateral melalui mekanisme ASEAN, diplomasi hukum serta diplomasi pertahanan melalui hukum dengan berdasarkan UNCLOS 1982, serta diplomasi pertahanan melalui penguatan *confidence-building measures* untuk mencegah eskalasi konflik. Sementara itu, terhadap pembentukan AUKUS, Indonesia lebih menekankan diplomasi preventif dan diplomasi pertahanan dengan mendorong dialog, transparansi, dan penghormatan terhadap norma keamanan kawasan tanpa berpihak pada salah satu kekuatan besar. Pendekatan tersebut mencerminkan implementasi politik luar negeri bebas aktif yang memanfaatkan instrumen diplomasi sebagai sarana utama dalam mempertahankan stabilitas keamanan ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis kerja sama pertahanan Indonesia sebagai instrumen strategis dalam memperkuat keamanan kawasan ASEAN dalam menghadapi ancaman tradisional. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga kesimpulan utama.

Pertama, persepsi ancaman di kawasan ASEAN bersifat dinamis dan tidak seragam. Berdasarkan *Balance of Threat Theory*, persepsi tersebut dibentuk oleh kombinasi *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capabilities*, dan *aggressive intentions*. Dalam konteks ini, Tiongkok dipersepsikan sebagai ancaman langsung melalui aktivitasnya di Laut China Selatan, sedangkan AUKUS dipandang sebagai faktor yang memperkuat rivalitas kekuatan besar dan meningkatkan ketidakpastian keamanan kawasan. Perbedaan persepsi tersebut berimplikasi pada fragmentasi respons negara-negara ASEAN dalam menghadapi dinamika keamanan regional.

Kedua, Indonesia memperkuat keamanan kawasan melalui kerja sama pertahanan pada tingkat bilateral, multilateral, dan minilateral. Kerja sama tersebut tidak hanya memperluas kemitraan strategis dengan berbagai negara, tetapi juga memperkuat mekanisme keamanan kawasan melalui forum-forum ASEAN. Upaya tersebut didukung oleh penguatan kapabilitas pertahanan nasional melalui modernisasi *Minimum Essential Force* (MEF), sehingga menciptakan sinergi antara pembangunan kekuatan domestik dan kerja sama pertahanan eksternal dalam menjaga stabilitas kawasan.

Ketiga, diplomasi Indonesia berperan sebagai instrumen utama dalam mengelola ancaman keamanan kawasan melalui pendekatan non-konfrontatif yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Dalam perspektif *Regional Security Complex Theory*, Indonesia memanfaatkan diplomasi multilateral, penguatan norma hukum internasional, dan pembangunan kepercayaan antarnegara untuk merespons dinamika keamanan kawasan. Meskipun demikian, efektivitas diplomasi tersebut masih dipengaruhi oleh prinsip non-interferensi ASEAN, keterbatasan sumber daya pertahanan, dan koordinasi antarlembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan keamanan kawasan ASEAN memerlukan sinergi antara kapabilitas pertahanan nasional, kerja sama pertahanan regional, dan diplomasi yang adaptif agar Indonesia mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu pilar stabilitas kawasan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan dan diplomasi Indonesia merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam memperkuat keamanan kawasan ASEAN di tengah meningkatnya dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Melalui penguatan kapabilitas pertahanan, pengembangan kerja sama pada tingkat bilateral, multilateral, dan minilateral, serta penerapan diplomasi yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berperan sebagai *regional stabilizer* dalam menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 13(1). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>
- Adhipratama, A.I., 2025. Dinamika Persaingan Geopolitik Di Laut Cina Selatan Dan Implikasi Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Asean. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, 394–407. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5314>
- Alice D. Ba, 2009. (Re)Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations. Stanford University Press.
- Anwar, S.R.S., Putri, A.M.A., Fikri, A.A.A., Fatwa, A.F., 2025. Dinamika Sengketa Internasional: Sengketa Wilayah di ASEAN. *SIYAR Journal* 5, 88–106. <https://doi.org/10.15642/siyar.2025.5.1.88-106>
- Arif, M., Afriansyah, A., Chairil, T., & Lestari, G. A. (2024). Grey zone conflict in the South China Sea: The challenges for Indonesian maritime security governance. *Contemporary Southeast Asia*, 46(3), 407–434. <https://doi.org/10.1355/cs46-3c>
- Ariani, L.F., 2024. Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat. *Diplomacy and Global Security Journal* 1. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2895>
- Arifin, B., Damanik, A., 2020. The Implementation Of Indonesia's Counter Piracy Strategies Through Multilateral Cooperation In The Malacca Strait (2004-2009). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.19166/verity.v12i23.2482>
- Arsy, M., Shiddiqy, A., Sukma, A.N., Rahmawati, S., 2025. Minimumessential Force (Mef) Dalam Perspektif Keamanan Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)* 11.
- ASEAN, 2016. ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025. Jakarta.
- ASEAN, 1967. The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration). Bangkok.
- Buzan, B. (1983). People, states and fear: The national security problem in international relations. Wheatsheaf Books.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). Regions and Powers: The Structure of International Security.
- Bock, A. M., & Henneberg, I. (2013). Why Balancing Fails: Theoretical Reflections on Stephen M. Walt's "Balance of Threat" Theory. University of Cologne. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2409228>

- Caballero-Anthony, M., 2022. The ASEAN way and the changing security environment: navigating challenges to informality and centrality. *International Politics*. <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0>
- Chang, C.C., Yang, A.H., 2020. Weaponized Interdependence: China's Economic Statecraft and Social Penetration against Taiwan. *Orbis* 64, 312–333. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2020.02.002>
- Cherhat, T., 2022. China: The Story of a Missed Opportunity. How China Managed to Disregard the South China Sea Ruling. *Conflict Studies Quarterly* 44–59. <https://doi.org/10.24193/csqs.41.3>
- Cheyre, J. E. (2013). Defence diplomacy. In A. F. Cooper, J. Heine, & R. Thakur (Eds.), *The Oxford handbook of modern diplomacy* (pp. 203–220). Oxford University Press.
- Chubb, A., 2020. PRC Assertiveness in the South China Sea Measuring Continuity and Change, 1970–2015. *Int. Secur.* 45. https://doi.org/doi.org/10.1162/isec_a_00400
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*.
- Creswell, J. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- De Castro, R.C., 2022. Under the shadow of the giants: The ASEAN in search of a common strategy in a fluid and perilous Indo-Pacific region. *Asian Journal of Comparative Politics* 7, 282–301. <https://doi.org/10.1177/20578911211014598>
- Emilia Br Sembiring, A., Agung Banyu Perwita, A., Eko Hadisancoko, R., Wulandari, A., Naudy Gea Avanantsoa, H., 2024. The Implementation of Confidence-Building Measures (CBMs) in the South China Sea for Regional Stability through the ASEAN Regional Forum (ARF). *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity* 10, 308–320. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33172/jp.v10i2.19559>
- Eshanasir, R.T., 2025. Freedom Of Navigation In The South China Sea: China's Legal Positions And United States' Freedom Of Navigation Operations. *Jurnal Mimbar Hukum* 37(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v37i2.23333>
- Fanani, A., Wayan Midhio, I., Hendra, A., 2024. TANTANGAN PERTAHANAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045. *TheJournalish: Social and Government*. <https://doi.org/https://doi.org/110.55314/tsg.v5i4.858>
- Figo, A., Ervin, M., 2022. Dampak Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pencapaian Minimum Essential Force (MEF) Tahap II. *Global & Policy* 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jgp.v10i02.3746>
- Gibran, M.N., Mahroza, J., Afrizal, A., Priyanto, P., Patmi, S., Budiyantri, F., Prakoso, L.Y., 2024. Indonesian Strategic Leadership 5.0 Amidst Thucydides Trap (Dynamic System Approach). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, 1182–1198. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2085>
- Harsono Putra, pradiya Y., 2025. Kepentingan Amerika Serikat Di Kawasan Asia Pasifik Dalam Peningkatan Kerja Sama Pertahanan Dengan Indonesia Tahun 2020-2024. *Diplomacy and Global Security Journal* 2. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4581>
- Haura, S., Maria, A., Sumala, J., Indri Yulianti, S., Prakoso Aji, M., 2025. Bureaucratic Analysis Of Indonesia's Ministry Of Defence: Advancing National Defense Diplomacy Through The 2024 Indonesia-Australia Defence Cooperation Agreement (DCA). *Jurnal Hubungan Internasional* 8, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.33822/mjihi.v8i1.10844>
- Herindra, M., 2025. Indonesia's Strategic Posture in the Indo-Pacific: Balancing Maritime Defence, Diplomacy, and Regional Stability. *Proceeding Jakarta Geopolitical Forum* 8, 63–67. <https://doi.org/10.55960/jgf.v8i1.276>

- Idris, A.M., Sasongko, N.A., Kuntjoro, Y.D., 2022. AUKUS Cooperation in the Form of Australian Nuclear Submarine Technology for Stability in Indo-Pacific Region. *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 2454–6186.
- Jervis, R., 1976. *Perception and Misperception in International Politics*, 1st edition. ed. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Jones, W.J., Supakul, C., 2025. ASEAN Centrality in the Era of Great Power Competition: Hedging for Survival and Prosperity. *Journal of Social Sciences* 55, 431–470. <https://doi.org/10.61462/cujss.v55i2.5114>
- Kennedy, P.S.J., 2023. Indonesian Defense Industry and Minimum Essential Force. *IRJEMS : International Research Journal of Economics and Management Studies* 2. <https://doi.org/10.56472/25835238/irjems-v2i2p116>
- Koloay, J.S., Miknamara, Indra, 2024. Peran Indonesia dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Kawasan Regional Asean di Tengah Perebutan Pengaruh Negara-Negara Great Power. *Syntax Admiration* 5.
- Kusumadewi, H., & Wiswayana, W. M. (2024). Multilevel hedging for middle-regional power: Indonesia ascent toward powerhood through hedging. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(2), 392–413. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.591>
- Li, M., 2022. ASEAN's responses to AUKUS: implications for strategic realignments in the Indo-Pacific. *China International Strategy Review* 4, 268–287. <https://doi.org/10.1007/s42533-022-00121-2>
- Manan, U. A., Subagyo, A., & Rachmat, A. N. (2024). Eksistensi pakta pertahanan AUKUS pada stabilitas keamanan Indo-Pasifik. *Diplomacy and Global Security Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2884>
- Novyanto, S.A., Faisol, A., 2022. Analisis Pengadaan Alutsista Sebagai Perkembangan Industri Pertahanan Di Indonesia 7, 85–98.
- Nugrara, M.H.R., 2017. Perencanaan Strategis Pertahanan Masa Depan Indonesia: Analisis Pada Lingkungan Strategis Asia Tenggara (Asean) Periode 2015-2020. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.235>
- Nur Anissa, Y., Djuyandi, Y., 2021. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Minimum Essential Froce (MEF) Dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (Tni). *Scripta : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Nurfauzi, A., Lampita, F., Mahendra, M.R., 2022. The Impact of AUKUS in Indonesian Perspective: Regional Military Balance and Security Dilemma. *Jurnal Sentris* 3, 90–103. <https://doi.org/10.26593/sentris.v3i2.6079.90-103>
- Nurjanah, I., & Silaen, C. A. M. (2024). AUKUS-RI: The Answer for Indonesia's Future Maritime Challenges Over the North Natuna Sea? *Jurnal Lemhannas RI*, 12(3), 261–276. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.910>
- Nurjannah, S., Ardiyanti, D., Abdallah, K.A.R., Mubarak, S., 2025. An Overview Of Japan-Indonesia Maritime Security Of Indo Pasific Region. *Indonesian Journal of International Relations* 9, 162–181. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.495>
- Okwara, E.C., 2025. China's Maritime Strategy and Its Impact on the Security Perceptions of Southeast Asian States. *Kashere Journal Of Politics And International Relations* 3.
- OYu, K., I.M, V., O.IO., K., I.M., B., 2024. Asean Regional Forum As A Cooperative Security Mechanism 5–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.17721/apmv.2024.159.1.46-53>
- Pangemanan, A., Ibrahim, A., Suryanti, B.T., Hermansah, F., Putra, P., 2021. Upaya Diplomasi Pertahanan ASEAN Di Laut Cina Selatan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7, 2021.
- Parent, J.M., Rosato, S., 2015. Balancing in neorealism. *Int. Secur.* 40, 51–86. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00216

- Pham, M. (2024). ASEAN's South China Sea dilemma: Between unity and division. *The Diplomat*.
- Qiao-Franco, G., Karmazin, A., Kolmaš, M., 2025. The Indo-Pacific and the Next Phase of ASEAN Centrality. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 44, 413–435. <https://doi.org/10.1177/18681034241307658>
- Saputra, M., 2023. Japan's Increasing Security Cooperation With Indonesia, 2013-2022. Naval Postgraduate School, California.
- Saputra, N. R., Ramadhan, F. A., & Susilo, A. R. (2024). Sengketa wilayah perairan Laut Natuna antara Indonesia dan China dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(1), 47–61. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.18427>
- Sarjito, A., 2023. Defense Policy Roadmap Towards a Golden Indonesia 2045: Establishment of the Indonesian Space Armed Forces. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, 188–197. <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i3.403>
- Sigit, Bachtiar, J.W., Christina, N., 2025. The Role of ASEAN Outlook on Indo-Pacific towards China's Coercive Policies in South China Sea Dispute. *Journal of Arts and Thai Studies* 47. <https://doi.org/10.69598/artssu.2025.4132>
- Silalahi, A. E., Pedrason, R., Hadisancoko, R. E., Surjaatmadja, S., Risdhianto, A., & Almubaroq, H. Z. (2023). Indonesia's perspective and possible strategies as the chairmanship of ASEAN 2023 in responding to the emergence of Australia–UK–USA defense pact. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 13(2), 183–205. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v13i2.13007>
- SIPRI, 2026. Trends in world military expenditure, 2025.
- Soesilowati, S., Pratiwi, F.I., Yakti, P.D., 2025. Politik dan Keamanan Internasional. Airlangga University Press.
- Sukma, R., 2003. The Future of ASEAN: Towards a Security Community. Jakarta.
- Surahman, Nengah Putra, I., Asvial, M., 2024. Independence of the Indonesian Defense Industry and Challenges in Defense Budget Allocation. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)* 3.
- Tan, S. S., & Singh, B. (2012). Introduction. *Asian Security*, 8(3), 221–231. <https://doi.org/10.1080/14799855.2012.723916>
- Teo, S., 2023. The Future of ADMM-Plus in the Indo-Pacific.
- Tow, W. T., & Taylor, B. (2010). What is Asian security architecture? *Review of International Studies*, 36(1), 95–116. <https://doi.org/10.1017/S0260210509990520>
- Umar, A. R. M., & Santoso, Y. N. (2023). AUKUS and Southeast Asia's Ontological Security Dilemma. *International Journal*, 78(3), 435–453. <https://doi.org/10.1177/00207020231197767>
- Villia, L.G., Susanti Kaka, A., Subandi, Y., 2026. Dampak Konflik Laut Natuna Utara Terhadap Stabilitas Keamanan Indonesia Pada Tahun 2021-2023. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.60126/jim.v4i1.1444>
- Walt, S.M., 1987. *The Origins of Alliances*. Cornell University Press.
- Waltz, K.N., 1979. *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Wene, A. L. (2021). Determinasi Pakta AUKUS terhadap Keamanan Asia Tenggara. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 5(2), 142–154. <https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.3990>
- Widyaksa, A., Ciptomulyono, U., Suharyo, O.S., Astika, I.M.J., Purnomo, J., Susilo, A.K., 2024. Impact Assessment of Minimum Essential Force (MEF) Achievement of Indonesian Navy Using Integrated Delphi-AHP-TOPSIS. *Journal of Maritime Research* 177–191.
- Wilkins, T. S. (2023, February 16). The "minilateral moment" and the regional security architecture in the Indo-Pacific (NIDS Commentary No. 254). National Institute for Defense Studies.

- Yanga, Y., & Zou, Y. (2024). Development and National Security: Indonesia's Natuna Island and the South China Sea Issue. *Third World Quarterly*, 45(3), 493–512. DOI: <https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2270507>
- Yusgiantoro, P., Siagian, U. W. R., Reksoprodjo, A. H. S., Gustin, D. R. A., & Asri, N. D. (2023). Security–Energy Nexus in Indonesia's Border: The Case of Natuna. *Indonesian Journal of Energy*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.33116/ije.v7i1.207>